

**Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Pada Masa
Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)
Khususnya di Pulau Jawa**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Akhir Guna
Memperoleh Gelar sarjana Sastra Pada Program Studi Sastra Jepang
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

DISUSUN OLEH:

ANG GUNAWAN

F 911 05 005

JURUSAN SASTRA JEPANG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

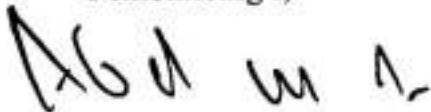
2008

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor :
5263/H4.11.1/PP.27/209 Tanggal 10 Nopember 2009, dengan ini kami
menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 08 Juli 2010

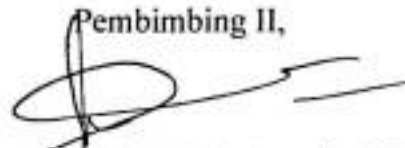
Pembimbing I,



Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba

Nip. 1966 1231 1992 12 1001

Pembimbing II,




Margriet Moka Lappia, S.S.

Nip. 195601729 1983 03 2 002

Disetujui untuk diteruskan

Kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Sastra Jepang



Dra. Hj. Hamsinah Yasin, M.Hum

Nip. 19541201 1987 03 2 001

SKRIPSI

**Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Pada Masa
Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)
Khususnya di Pulau Jawa**

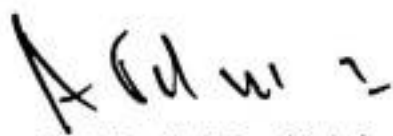
Disusun dan diajukan oleh

**ANG GUNAWAN
Nomor Pokok : F911 05 005**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 20 Juli 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,



Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba
Nip. 1966 1231 1992 12 1001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Drs. H. Burhanuddin Arafah, M. Hum, Ph.D
Nip. 19650303 1990 02 1 001

Pembimbing II,



Margriet Moka Lappia, S.S.
Nip. 19560129 1983 03 2 002

Ketua Jurusan Sastra Jepang
Fakultas Ilmu Budaya UNHAS



Dra. Hj. Hamsinah Yasin, M. Hum
Nip. 19541201 1987 03 2 001

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA


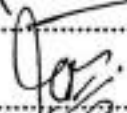
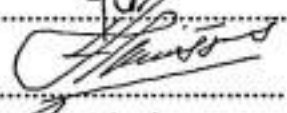

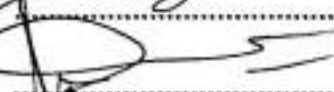
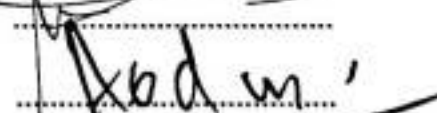
Pada hari ini, Jumat Tanggal 20 Juli 2010

Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :

Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) Khususnya di Pulau Jawa yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan/ Program Studi Sastra Jepang Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 Juli 2010

Panitia Ujian Skripsi

1. Dra.Hj. Hamsinah Yasin, M.Hum	Ketua	
2. Taqdir, S.Pd	Sekretaris	
3. Dr. Edward L Poelinggomang, M.A	Penguji I	
4. Rudy Yusuf, S.S	Penguji II	
5. Margriet Moka Lappia, S.S, M.S	Konsultan I	
6. Pror.Dr.Abd.Rasyid Asba	Konsultan II	

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunianya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya.

Sekiranya masih ada kekurangan dalam penelitian ini, saya berharap ini dapat disempurnakan di kemudian hari dalam penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis berharap bisa lebih banyak mendapatkan masukan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang lebih berpengalaman.

Pada kesempatan ini penulis berkenan menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof.Dr.Abd.Rasyid Asba dan Ibu Margriet Moka Lappia,S.S,M.S, selaku dosen pembimbing yang bersusah payah dan rela menyisihkan banyak waktu dalam membimbing penulis demi terselesaikannya karya tulis ini.

Sujud dan sembah yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tuaku tercinta (M.Saleh (Alm) dan Hanidah) dan semua keluargaku, atas segala jerih payah serta pengorbanannya selama ini baik material maupun spiritual serta do'a dalam setiap shalatnya. Penulis juga sangat berterima kasih kepada om dan tante yang juga telah saya anggap sebagai orang tuaku sendiri (Dr.Mediaty,S.E,M.Si,Ak dan dr.Hisbullah,S.P,An, KIC) yang telah membiayai uang kuliah saya dari smester awal tanpa meminta balasan apapun, hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan, perhatian dan kerjasama kepada:

1. Tante Wahidah Amin, Fitri Amin, paman Ammar, paman Ahyar, paman Darus dan tante Ati yang telah mendoakan saya agar bisa secepatnya menyelesaikan kuliah.
2. Kepada yang tercinta dan tersayang Monalisa Putri Karang yang sudah mensupport dan sumber semangat saya untuk bisa secepatnya menyelesaikan karya tulis ini.
3. Saudara kandungku, Rizki Noor Adha, Imelda Purnama Sari terimakasih atas laptopnya, dan Andika Onassis Adha yang telah mengisi hari-hariku dengan penuh canda tawa saat sedang bermasalah.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
5. Dosen-dosenku di jurusan Sastra Jepang
6. Anak-anak HIMASPA 05(Yoesran, Enal, Yances, Ammar, Ippank, Echa, Eric, Dhidi, Yayat, Indra, Unhy, Dian jauhari, Phitto, Dirk, dan Nuchan) 06 (Akmal, Ipul), 07, 08, 09, 10 dan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Anak-anak yang sering wisata bersama ke Toraja, Palopo, Bone, Bira, Bulukumba, meskipun nantinya semua jauh, kita tetap akan adakan reunian wisata ya.
8. Anak-anak CLF di Jepang dan di Indonesia, semoga bisa kembali keJepang untuk lanjut kuliah, jalan-jalan dan refreshing.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Penulis berharap apapun yang tersaji dalam karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Makassar, 08 Desember 2010

penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengasahan.....	iii
Halaman Penerimaan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Metode Penelitian Pustaka.....	7
1.6.2 Analisis Data.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Sejarah.....	9
2.2	Pengertian Kebijakan.....	11
2.3	Penelitian yang Relevan.....	12
2.4	Gambaran Umum Jepang.....	13
2.4.1	Letak dan Keadaan Geografi.....	13
2.4.2	Pemerintahan dan Politik.....	14
2.4.3	Sosial-Budaya.....	15
2.4.4	Ekonomi.....	16
2.5	Kerangka Pemikiran.....	17

BAB III LATAR BELAKANG

3.1	Latar Belakang dan Tujuan Perang Pasifik.....	18
3.2	Tujuan Pendudukan Indonesia Oleh Jepang pada perang Asia Timur Raya.....	20
3.3	Langkah- langkah masuknya Jepang di Indonesia (1942-1945).....	21

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Struktur Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia.....	25
4.2	Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa (1942-1945).....	27
4.2.1	Bidang Politik.....	27
4.2.2	Bidang Ekonomi.....	29
4.2.3	Bidang Sosial-Budaya.....	34

4.2.4	Bidang Militer.....	39
4.3	Dampak Positif-Negatif Pendudukan dan Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia Khususnya di- Pulau Jawa (1942-1945).....	45
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran-saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....		52

ABSTRAK

ANG GUNAWAN, F911 05 005 “Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) Khususnya di Pulau Jawa” dibimbing oleh MARGRIET MOKA LAPPJA dan ABDUL RASYID ASBA.

Skripsi ini merupakan suatu usaha penulis mengutarakan pendapat, bagaimana pandangan penulis didukung dengan beberapa pendapat para ahli mengenai kebijakan pemerintah militer Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

Dengan menggunakan metode dan teknik penelitian pustaka serta analisis data, penulis mendapatkan bahwa selama pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang banyak membuat kebijakan-kebijakan untuk bisa sepenuhnya mendapat simpati rakyat Indonesia, dan utamanya kebijakan-kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk menopang upaya perang Jepang.

Hasil dari penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Meskipun kebanyakan dari kebijakan tersebut bersifat negatif, tapi ada juga sisi positif yang bisa kita ambil.

抽象

ジャワにおける ; 日本政府の ; インドネシア ; 占領 (1942-1945) の ; 政策 について F911.05.005 の ; アン ; グナワン。 ; 先生 は MARGRIET MOKA LAPPIA ; 先生 と ABDUL RASYID ASBA ; 先生。

この ; 論文は ; 日本の ; インドネシア ; 占領の ; 目的と ; 背景の ; 新しい ; 情報を ; 提供し、 ; 当時 ; どのような ; 政策が ; ジャワで ; 行われ、その ; 政策の良い ; 点、 ; 悪い ; 点についても ; 述べる。

; 研究方法は ; 図書研究や ; 種類分析である。 ; 図書研究は ; 私はこの ; 論文を ; 読むすべての ; 人々に、 ; 肯定的な ; 側面をよみとってほしと ; 願っています。また ; インドネシアと ; 日本のあいだの ; 協力が、より ; つよくなるこも ; 願っています。

このけんきゅうはまた、 ; インドネシアの ; 日本せんりよ
うの ; 歴史についてのちしきを ; 深めるための ; 資料になるとおも
います。

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedatangan Jepang di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu berlandaskan pada landasan riil dan idiil yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Landasan riil ini antara lain, karena adanya penambahan penduduk Jepang yang semakin pesat, sehingga dibutuhkan tempat baru bagi ledakan penduduk tersebut, kurangnya bahan mentah bagi industrialisasi Jepang, dan adanya pembatasan imigrasi ke Amerika dan Australia. Kemudian dipilihlah Indonesia sebagai tujuan imigrasi dan pencarian sumber alam, sebab daerah di Indonesia sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Sedangkan landasan idiilnya adalah ajaran Shintoisme yang dianut oleh bangsa Jepang mengenai "Hokkaichu", yaitu ajaran tentang kesatuan umat manusia. Melalui ajaran ini, Jepang sebagai negara yang maju ingin mempersatukan bangsa-bangsa di Asia di bawah Kesatuan Asia Timur Raya, sehingga Jepang pada awalnya mendapat banyak simpati sebagai saudara tua di antara bangsa Asia lainnya. (Poerwoko, cs, 2008:13).

Untuk keberhasilan ekspansinya, bangsa Jepang menggunakan banyak strategi atau taktik. Antara lain pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melaksanakan salah satu strateginya yaitu mengebom Pearl Harbor. Pengeboman itu dimaksudkan untuk memutuskan kekuatan Amerika Serikat

di Asia-Pasifik, agar memudahkan Jepang untuk menguasai wilayah lainnya di Asia termasuk Indonesia. Untuk menambah kekuatan, Jepang juga menggabungkan diri dengan Jerman dan Italia yang juga terlibat dalam Perang Dunia II. Kemudian persekutuan itu dikenal dengan sebutan poros Roberto (Roma-Berlin-Tokyo). Setelah bergabung dengan Jerman dan Itali, Jepang pun mulai penyerangannya untuk menguasai wilayah Asia Tenggara lalu pada akhirnya Jepang berhasil masuk ke Indonesia yang dulunya dinamakan Hindia-Belanda, dan berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Belanda yang pada waktu itu menguasai Indonesia.

“Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yang khususnya dikuasai oleh angkatan darat dan laut Jepang. Sumatera di tempatkan di bawah angkatan darat ke-25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah angkatan darat ke-16; kedua wilayah ini berada di bawah angkatan darat wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh angkatan laut. Pada umumnya, Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting; sumber dayanya yang paling utama adalah manusianya”. (Nando Baskara, 2008:65).

Angkatan darat ke-16 Jepang menaklukkan pemerintahan Hindia-Belanda dan menduduki Jawa pada tanggal 8 maret 1942. Sebelum mendarat di pulau Jawa pihak Jepang telah menjalankan propoganda secara intensif melalui radio gelombang pendek yang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang Asia Timur Raya untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Oleh karena itu, reaksi pertama orang Indonesia terhadap kedatangan Jepang di pulau Jawa tidak begitu buruk, dan beberapa orang bahkan menyambut kedatangan mereka. Dengan memanfaatkan sambutan baik masyarakat di pulau Jawa, Jepang mulai

menguasainya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan di pulau Jawa yang berpihak kepada rakyat, seperti mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk mengimplementasikan tujuan propaganda-propoganda mereka, khususnya guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang anti-Belanda, membentuk struktur pemerintahan sementara dengan mengangkat langsung beberapa orang Indonesia untuk mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang di tahan yang diberikan langsung oleh pimpinan daerah pendudukan dan menghentikan gerakan-gerakan revolusi yang mengancam akan mengikuti penaklukan mereka.

Berikut adalah alasan kenapa Jepang membuat beberapa kebijakan yang penting di Indonesia khususnya di pulau Jawa

Menurut A. Rasyid Asba dalam laporan penelitiannya mengenai "Aktivitas Ekonomi Jepang di Sulawesi Selatan Pada Masa Perang (1942-1945)" "Perbedaan tipe dan karakteristik kebijakan atas dasar wilayah tiap-tiap daerah bukan hanya menjadi dasar pertimbangan utama tetapi juga karakteristik penduduk dan adanya polarisasi pemerintahan antara angkatan darat dan angkatan laut Jepang". (2005:1).

Menurut Dwi Martanto dalam Blognya (<http://martanto.blogspot.com>) "kebijakan ekonomi pemerintah Jepang di pulau Jawa (1942-1945)", "Di awal pendudukannya, Jepang menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat baik. Berbagai kebijakan berpihak kepada bangsa Indonesia. Bendera merah putih dibiarkan berkibar, dan bahasa Indonesia bebas digunakan oleh masyarakat. Sedangkan posisi yang kosong dalam pemerintahan didistribusikan kepada kaum terpelajar Indonesia".

Indonesia dalam pandangan rakyat sebentar lagi akan merdeka. Bagi Jepang tindakan tersebut hanya upaya jangka pendek untuk mendapat

dukungan rakyat sebelum mereka menunjukkan tujuan utama kedatangannya. Pada perkembangan selanjutnya kebijakan Jepang terhadap Indonesia berubah. Orientasi yang sebenarnya lebih diarahkan pada upaya eksploitasi Sumber Daya Alam, mobilisasi sumber daya manusia, serta mengupayakan mobilisasi sumber daya kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

Selain membuat kebijakan, pendudukan Jepang di Indonesia juga mempunyai dampak positif yang menguntungkan masyarakat dan dampak negatif yang juga merugikan masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri.

Menurut Sarah Lie, (Mei, 25, 2007) dalam artikelnya yang berjudul "Pendudukan Jepang di Indonesia"

Salah satu dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia adalah "para pemuda dapat memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis atas didirikannya PETA oleh pemerintah Jepang di Indonesia, dan salah satu dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia terhadap masyarakat dan Negara Indonesia adalah adanya *romusha* dan pengeksploitasian alam Indonesia secara besar-besaran".

Meskipun banyak data yang memaparkan tentang latar belakang, tujuan, kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Jepang dan apa saja dampak positif-negatif di daerah yang telah dikuasai khususnya Indonesia, tetapi penulis mendapatkan data-data tersebut secara terpisah-pisah dari buku yang hanya memfokuskan pembahasan pada satu bidang. Maka dari itu penulis akan mengumpulkan data-data yang tersebar mengenai latar belakang, tujuan, kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Jepang dan apa saja dampak positif-negatif di daerah yang telah dikuasai khususnya di pulau Jawa, Serta menyusun secara rapi dan terperinci data-data yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga penulis menghasilkan karya tulis dengan

judul “Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) Khususnya di Pulau Jawa”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dalam strategi penguasaan wilayah di Indonesia, Jepang mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menarik simpati rakyat agar bisa mempercepat perluasan penguasaannya.
2. Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang, ada yang menguntungkan dan merugikan masyarakat.

1.3 Batasan masalah

Sejarah negara Jepang sangat menarik untuk dibahas, karena meskipun negara kecil, tetapi negara Jepang telah membuktikan kekuatannya untuk mengungguli bangsa asing pada perang Asia Timur Raya (1942-1945). Mengingat luasnya permasalahan dan relevansi pada peristiwa perang Asia Timur Raya yang melibatkan negara Indonesia di dalamnya, Penulis membatasi penulisan ini dengan hanya membahas “Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) Khususnya di Pulau Jawa”.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan demikian dalam karya tulis ini akan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah.

1. Apa saja kebijakan yang diberlakukan pemerintah militer Jepang dalam pendudukannya di pulau Jawa?

2. Bagaimana realisasi kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa ?
3. Apa saja dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa?

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Meneliti lebih dalam mengenai latar belakang, tujuan dan kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah Jepang di pulau Jawa.
2. Mengungkapkan dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan tersebut di pulau Jawa.
3. mengungkapkan dampak positif-negatif pendudukan Jepang di pulau Jawa.
4. menyelesaikan tugas akhir strata satu dan mendapat gelar Sarjana Sastra

1.5.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk menambah ilmu pengetahuan sejarah mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia bagi semua pihak yang membaca karya tulis ini, agar bisa menilai secara objektif dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai "Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) khususnya di Pulau Jawa".

1.6 Metode Penelitian

Penelitian terhadap objek yang diteliti dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dan analisis data.

1.6.1 Metode Penelitian Pustaka

Metode pustaka (*library research*) adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan membaca buku-buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang *relevan* dengan penulisan karya tulis ini. Metode ini dipakai oleh penulis untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan karya tulis ini untuk itu dalam mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik

- a. Teknik Identifikasi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian/referensi yang berhubungan dengan topik bahasan.
- b. Teknik catat, dilakukan dengan cara mencatat data-data atau referensi yang telah didapat dari pustaka.
- c. Teknik Download, dilakukan dengan cara mencari data-data di Internet, yang berhubungan dengan karya tulis ini, kemudian mendownload data-data tersebut dan disatukan bersama data-data yang telah didapat.

1.6.2 Analisis data

Metode analisis data yaitu mengelola data yang telah di kumpulkan melalui metode pustaka. Data-data yang telah dikumpulkan dan

diklasifikasikan ini kemudian dianalisa. Hasil deskripsi ini kemudian dipelajari untuk di manfaatkan sebagai bahan tulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sejarah

Dalam masyarakat awam sejarah sering diidentikkan dengan nama tokoh, candi, tanggal, tahun dan tempat terjadinya peristiwa. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syajaratun*, artinya pohon. Sebuah pohon terdiri dari akar, dahan, ranting dan daun sehingga sejarah diartikan sebagai asal usul, riwayat dan silsilah yang menyerupai sebuah pohon. Dalam bahasa Arab ilmu yang mempelajari kisah masa lalu di kenal dengan istilah *Tarikh*. Di Eropa, sejarah dikenal dengan istilah *history* (Inggris), *histoire* (Perancis), *storia* (Italia), semuanya berasal dari bahasa Yunani yaitu *Historia* yang artinya (orang pandai), sementara dalam bahasa Belanda sejarah disebut dengan *geschiedenis* (kejadian), dalam bahasa Jerman disebut *geschichate* (sesuatu yang terjadi).

Dengan demikian sejarah dapat disimpulkan sebagai kejadian masa lampau dari kehidupan manusia. Akan tetapi tidak semua kejadian masa lampau dapat masuk kedalam ruang lingkup sejarah . Yang masuk kedalam sejarah adalah kejadian-kejadian yang mempunyai pengaruh besar pada masanya dan masa-masa berikutnya. (sumber:<http://sejarahindonesiaumcirdka.blogspot.com> "pengertian sejarah").

Berikut adalah beberapa definisi Sejarah dari beberapa tokoh Sejarah.

Menurut Muthahhari, ada tiga cara mendefinisikan Sejarah dan ada tiga disiplin kesejarahan yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Sejarah Tradisional (*tarikh naqli*) adalah pengetahuan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan kemanusiaan di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini.
- b. Sejarah Ilmiah (*tarikh ilmy*), yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui pendekatan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau.
- c. Filsafat Sejarah (*tarikh falsafi*), yaitu pengetahuan tentang perubahan-perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain, ia membahas hukum-hukum yang menguasai perubahan-perubahan ini. Dengan kata lain, ia adalah ilmu tentang menjadi masyarakat, bukan tentang mewujudnya saja.

(Sumber: <http://yahooyanswers.com> "pengertian sejarah menurut 16 tokoh").

Menurut Peter Burke dalam bukunya Sejarah dan Teori Sosial "sejarah adalah studi tentang masyarakat manusia dalam arti jamak, dengan titik berat pada perbedaan-perbedaan antar masyarakat dan perubahan-perubahan di masing-masing masyarakat dari waktu ke waktu".

Sedangkan *Menurut E.H. Carr* dalam buku teksnya What is History mendefinisikan "Sejarah adalah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan lampau, suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara Sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya". Karena itu manusia tetap harus

mempelajari sejarah sekalipun itu merupakan bagian yang gelap dari sisi kehidupan suatu Negara.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas mengenai sejarah, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sejarah adalah kejadian di masa lampau, mengenai karya dan karsa yang akan di bahas di masa yang akan datang, demi kepentingan masa depan tersebut.

2.2 Pengertian Kebijakan

dalam blog mangjaya@indobio.com yang ditulis oleh Mengjaya(2009) mengenai ilmu dan pengertian kebijakan, termuat beberapa definisi para ahli yang diambil penulis sebagai definisi kebijakan. Secara harafiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968:6). Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani, yang berarti kota. Dalam bahasa Latin kata ini menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah (Dunn,1981:7).

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan (Abidin, Zainal, 2004:103). Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Van Metter dan Van Horn (1975) mengemukakan kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan.

Dengan mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas, dalam karya tulis ini kebijakan dapat di simpulkan sebagai cara yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2.3 Penelitian yang Relevan

Dalam pendudukan Jepang di Indonesia selama lebih tiga tahun, berbagai kebijakan telah diambil untuk mengambil keuntungan dari daerah pendudukan, memobilisasi dan mengontrol rakyat Indonesia demi kepentingan perangnya. Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum menemukan skripsi lain yang membahas mengenai “kebijakan pemerintah militer Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) khususnya di pulau Jawa” yang diisi dengan latar belakang, tujuan, dan gambaran masuknya Jepang ke Indonesia. Untuk memudahkan penulis dalam menulis skripsi dengan judul tersebut, penulis membutuhkan data-data atau referensi dari buku yang telah ditulis oleh Aiko Kurasawa yang berjudul Mobilisasi dan Kontrol yang juga berasal dari penelitiannya sewaktu membuat thesis.

Dalam bukunya, Aiko Kurasawa lebih memusatkan perubahan sosial di pedesaan Jawa akibat mobilisasi dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang terhadap penduduk di pedesaan Jawa. Menurut hasil penelitian dalam buku yang telah ditulis Aiko Kurasawa, kebijakan-kebijakan pendudukan

Jepang di Jawa bertanggung jawab atas timbulnya bermacam-macam perubahan sosial di dalam masyarakat pedesaan.

2.4 Gambaran Umum Negeri Jepang

Disini penulis akan menguraikan sedikit mengenai negara Jepang secara umum, mengenai geografi, politik, sosial budaya dan ekonomi dalam periode menjelang perang Asia Timur Raya.

2.4.1 letak dan keadaan geografi

Jepang merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau utama di Jepang adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan yang terletak di lepas pantai sebelah timur benua Asia ini membentang sepanjang 3.800 km (2.360 mil) dan luasnya 378.619 km² (145.799 mil persegi).

Jika dilihat dari letak dan keadaan geografi pulau-pulau Jepang sangat dekat dengan semenanjung Korea, bagian Utara Jepang dekat dengan Rusia, pulau bagian Selatan Jepang yakni Okinawa dekat dengan Taiwan, dan Saipan dekat dengan pulau Guam.

“Sebelum meletusnya perang dunia ke II, dimana Jepang dihadapkan pada modernisasi dan industrialisasi besar-besaran, jepang mengalami masalah serius, yakni buruknya perekonomian, kebutuhan dengan sumber daya alam dan wilayah pemasaran untuk barang-barang yang diproduksi. Akibatnya, Jepang harus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, Solusinya adalah dengan melakukan penaklukan-penaklukan wilayah yang berpotensi untuk menopang kebutuhan sumber daya alam dan untuk pemasaran produk-produk untuk memperbaiki perekonomian mereka”. Nando Baskara (2008:27)

Dengan alasan tersebut Jepang memulai penaklukan-penaklukan dengan negara tetangganya yakni Taiwan (1872) yang dulunya disebut sebagai pulau Formosa. Lalu dua tahun kemudian Jepang berhasil memaksa Korea yang juga

merupakan negara tetangganya untuk membuka negaranya. Tahun 1894, Jepang berperang dengan China ketika Jepang berusaha merebut semenanjung Liaotung (kini Liaodong) di Manchuria selatan.

“Melihat agresivitas Jepang yang mulai ingin menguasai Asia Tenggara yang juga telah diduduki Inggris dan Belanda, Amerika langsung bertindak tegas yang diikuti oleh Inggris dan Belanda, dengan pembekuan aset Jepang di Amerika dan embargo bahan esensial seperti, minyak bumi, kapas, bahkan besi bekas”. (poerwoko cs, 2008:16).

2.4.2 Pemerintahan dan Politik

Seperti yang kita ketahui, pada awal kekuasaan keshogunan, kaisar tidak lebih hanya sekedar simbol negara.

“Shogun Tokugawa telah menutup negara Jepang selama kurang lebih 250 tahun. Tetapi lama kelamaan penerus keshogunan mulai melemah terhadap bangsa Barat ketika pada tahun 1854 sebuah armada kecil Amerika yang dipimpin oleh Matthew Calbraith Perry memaksa Jepang untuk membuka negaranya”. (Nando Baskara, 2008:27)

Keadaan itu tentu saja membuat masyarakat Jepang marah. Akhirnya pada tahun 1867-1868 terjadi Pemberontakan Samurai yang ingin kembali mengangkat kaisar sebagai pemimpin negara. Setelah keshogunan jatuh, maka kaisar Jepang yang bernama Mutsuhito melakukan pembaharuan yang disebut dengan Restorasi Meiji.

Pada masa inilah kaisar justru mendorong rakyat Jepang agar belajar lebih tekun dan untuk bisa menandingi keunggulan bangsa-bangsa lain. pada masa restorasi Meiji pula, Jepang banyak mempelajari demokrasi ala Barat. Parlemen (*diet*) yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk dan dibagi menjadi majelis tinggi (kalangan bangsawan) dan majelis rendah (wakil-wakil pilihan rakyat).

Sampai pada masa pecahnya perang dunia II Jepang menggunakan sistem pemerintahan seperti ini dengan kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang, dan dengan perdana menteri sebagai pemimpin untuk menjalankan perintah kaisar.

Restorasi Meiji mengakhiri kekuasaan para tuan tanah dan golongan samurai, serta berdasarkan undang-undang yang baru mulai membentuk angkatan darat dan angkatan laut serta kepolisian yang lambat laun mulai menguasai pemerintahan, membangkitkan semangat dan nasionalisme bahkan ultra-nasionalisme serta semangat ekspansi ke negara-negara lain

2.4.3 Sosial dan Budaya

Penutupan negara Jepang oleh keshogunan sebelum Restorasi Meiji membawa pengaruh sangat besar terhadap kebudayaan di Jepang. Selama pemerintahan shogun Tokugawa, yang sangat ditekankan adalah pentingnya moral, pendidikan, dan status dalam kelas sosial.

“Samurai memiliki hirarki paling tinggi dalam masyarakat, diikuti oleh petani, industriawan, dan pedagang. Mereka yang sudah menjadi bagian dari keempat kelas masyarakat tersebut tidak diperkenankan mengubah status sosialnya. Penduduk yang tidak termasuk dalam keempat status sosial tersebut, dianggap sebagai penduduk kelas lima”. (Abdul Irsan, 2005:14)

Setelah kejatuhan rezim Tokugawa, Jepang melakukan modernisasi besar-besaran yang dikenal dengan periode Meiji atau pembukaan negara terhadap negara asing. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup luas terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Jepang. Status sosial dalam masyarakat Jepang dihilangkan, terbukti dengan hilangnya status samurai dalam kehidupan masyarakat Jepang.

Setelah restorasi meiji, tidak terdapat lagi kekuasaan feodal yang menguasai atau memiliki wilayah sendiri di luar kekuasaan pemerintah Jepang. Seluruh wilayah menjadi bagian dari wilayah kekaisaran Jepang.

Di bidang kebudayaan, muncul kecenderungan di dalam negeri untuk tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang dirasakan mulai meluntur akibat pengaruh budaya asing yang semakin meluas. Dalam hal ini, Jepang mampu memadukan suatu kebiasaan baru yang tetap menghormati tradisi dan di pihak lain tetap mengikuti pola modernisasi yang berdasarkan kebiasaan budaya Barat.

2.4.4 Ekonomi

Dalam mengembangkan keadaan ekonominya Sebelum pecahnya Perang Dunia kedua, Jepang sering mengikuti pola pertumbuhan ekonomi dari luar negeri yang dianggap berhasil. Jepang mengikuti pola Inggris yang telah berhasil baik dalam pengembangan industri tekstil lalu kemudian mulai meletakkan dasar-dasar membangun industri beratnya. Sistem kartel di sektor industri di Jepang tumbuh dengan cepat dan maju, sehingga para pengusaha atau pedagang Jepang mempunyai peran besar di bidang ekonomi.

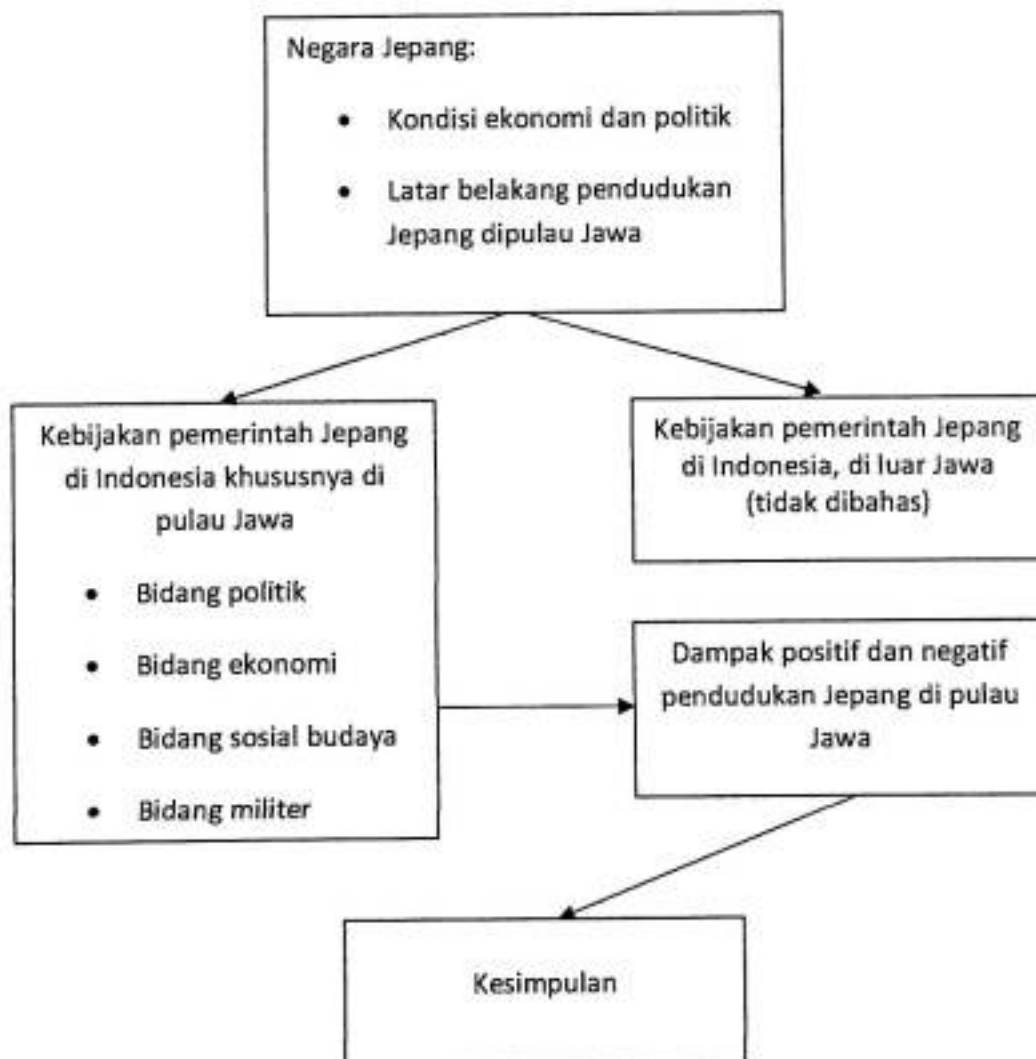
Perjalanan modernisasi Jepang tidak selamanya berjalan mulus. Karena Jepang ternyata juga harus menghadapi berbagai krisis ekonomi di dalam negeri, maupun akibat terkena imbas kondisi ekonomi dunia.

Di pertengahan tahun 1880-an Jepang mengalami krisis keuangan karena besarnya anggaran belanja untuk membiayai modernisasi Jepang. Negara ini kemudian melakukan reformasi dalam sistem keuangan dan nilai tukar uang asing serta dibentuknya *Bank of Japan* sebagai bank sentral. Setelah meletusnya perang Dunia I keadaan ekonomi Jepang semakin memburuk “dengan persoalan unemployment, meningkatnya tuntutan impor bahan makanan, dan regulasi ekonomi yang lebih mengutamakan pasar bebas”. (Abdul Irsan, 2005:29).

Masalah-masalah seperti inilah yang akhirnya membawa Jepang kepada pendudukan di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi untuk membuat negara Jepang kembali bisa memperbaiki masalah ekonomi dan untuk menjadikan negara pendudukan tersebut sebagai negara penyedia bahan-bahan untuk keperluan industri Jepang serta pasar bagi hasil industrinya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penulisan kerangka pemikiran ini berasal dari kesimpulan penulis atas permasalahan pokok yaitu apa saja kebijakan pemerintah Jepang di pulau Jawa dan apa saja dampak positif-negatif pendudukan Jepang di pulau Jawa



BAB III

LATAR BELAKANG

3.1 Latar Belakang dan Tujuan Perang Pasifik

Sampai sekarang, masih banyak sejarawan yang mencari tahu kebenaran berbagai kisah seputar Asia Timur Raya Perang akbar di belahan dunia sebelah Timur ini yang begitu mengagumkan, karena meski hanya dikobarkan oleh Jepang yang lebih kecil dari negara-negara sekutu, dengan cara menyerang *Pearl Harbour* tapi dampaknya sangat dirasakan oleh sejumlah negara di Asia dan Eropa. Ambisi Jepang untuk menjadi “yang terbesar” di wilayah Asia, sebenarnya sudah bisa disimak dari watak Ekspansif dan kemampuan angkatan laut serta angkatan daratnya yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Cina, Korea dan Rusia sejak tahun 1894-1905.

Sebelum pecahnya Perang Asia Timur Raya (1941), Jepang sebenarnya sudah mengalami kekalahan, dimana pada saat itu keadaan dalam negeri Jepang mengalami kemiskinan, kemelaratan dan kekacauan antara rakyat dan pemerintah, dimana rakyat menentang lemahnya pemerintahan terhadap bangsa Barat saat itu. Untuk mengatasi semua masalah dalam negerinya Jepang mulai berfikir untuk menguasai negara-negara yang dapat menguntungkan bagi negaranya, dengan cara melakukan invasi ke Manchuria yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan Cina untuk merebut sumber alam dan pasar dagang yang

sangat menguntungkan bagi siapa yang berhasil menguasainya. Negara-negara Barat yang kebanyakan juga imperialis itu, menentang keras pendudukan Jepang di Manchuria. Puncaknya, adalah pada saat Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1933. Pada 1937 Jepang menginvasi Cina, dan inilah awal dimulainya Perang Asia Timur Raya. Kemudian, diikuti dengan pendudukan di Vietnam 1940. Selain itu negara Jepang juga berhasil menguasai negara-negara Asia Tenggara lainnya yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia.

Menurut Masatake Okumiya, seorang mantan perwira angkatan laut kekaisaran Jepang dalam film *documenter* "Horror in the East" produksi Laurence Rees Historical Consultans : Professor Akira Iriye, Professor Sheldon Hatris, dan Professor Yuki Tanaka, yang di rilis tahun 2006.

"Saat itu, masalahnya populasi di negeri kami meningkat dan sumber daya alam tak mampu menampung peningkatan populasi itu. Idealnya, kami berharap menerima bantuan dari negara lain untuk memecahkan masalah itu. Tapi dulu dunia dikuasai Barat dan pemecahan masalah yang damai seakan mustahil, maka kami putuskan apa yang dulu dilakukan Inggris, Amerika, dan Perancis. Dan perlahan menggunakan kekerasan untuk pemecahannya".

Menurut Mr.Auwjong Peng Koen (P.K. Ojong), dalam bukunya "Perang Pasifik" tujuan Jepang ke Indonesia adalah "untuk mendapatkan minyak dan karet, untuk keperluan perang dan industri Jepang".

Mengenai seputar perang Asia Timur Raya ini, tujuan Jepang ingin menguasai negara-negara Asia Tenggara adalah untuk mencari minyak bumi dan batu bara yang digunakan untuk keperluan militer dan industrialisasi negara Jepang, dan negara yang paling berpotensi saat itu adalah Indonesia yang dulunya adalah Hindia-Belanda. Jepang sadar bahwa untuk menguasai suatu daerah yang

akan diduduki, Jepang harus menarik simpati masyarakat daerah tersebut dengan mencari tokoh-tokoh terkemuka yang dapat memobilisasi masyarakatnya, agar dapat lebih mudah menguasainya dan daerah yang paling berpengaruh saat itu adalah pulau Jawa.

3.2 Tujuan Pendudukan Indonesia Oleh Jepang pada perang Asia Timur Raya

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak negara yang ingin menguasainya dan tidak terkecuali negara Jepang.

“Jepang tertarik untuk menguasai Indonesia sejak negara-negara Barat yang telah menguasai sebagian negara penghasil bahan mentah di Asia Tenggara memutuskan hubungan dagang mereka dengan Jepang. Kerena merasa terdesak oleh keadaan itu, Jepang mulai mengambil jalan militerisme untuk menghadapi beberapa negara barat sekaligus yang telah menguasai Negara penghasil bahan mentah di Asia”. (Poerwoko, cs, 2008:13).

Indonesia yang pada waktu itu masih dikuasai Belanda pun tidak lepas dari incaran Jepang. Sebagai negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai peran sebagai tempat persediaan bahan mentah untuk kebutuhan industri dan perang Jepang. Peranan Indonesia pada saat itu sangat penting, dan itu terbukti dengan keinginan besar Jepang menguasainya walaupun harus dengan melawan beberapa negara kuat sekaligus.

“Peran Indonesia bagi Jepang pada perang Asia Timur Raya adalah sebagai penghasil bahan mentah untuk kebutuhan industri dan perang negara Jepang. selain itu Indonesia juga dijadikan tujuan pemasaran barang-barang Jepang yang nantinya dapat memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri Jepang yang pada saat itu terjadi kemiskinan dan kemelaratan”. (Nando Baskara Kami Kaze, 2008:33)

Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai penyedia bahan-bahan untuk keperluan industri dan kebutuhan perang, tetapi juga sebagai penstabil perekonomian di Jepang dengan cara memasarkan produk-produk Jepang kepada masyarakat Indonesia.

3.3 Langkah masuknya Jepang di Indonesia (1942-1945)

Pendudukan Jepang di Indonesia berawal dari Invasi angkatan laut Jepang ke wilayah Hindia-Belanda bagian timur. Invasi ini mulai dilancarkan setelah sebelumnya berhasil menguasai pulau Serawak yang terletak di sebelah selatan Filipina. Dari Serawak, pada tanggal 11 Januari 1942 pasukan Jepang kemudian berhasil mendarat dan menduduki pulau Tarakan, pulau kecil di dekat pulau Borneo (Kalimantan).

Pulau Tarakan merupakan pulau penghasil minyak yang besar di daerah Borneo yang telah menjadi prioritas utama bagi pihak Jepang, itu dikarenakan kebutuhan negara Jepang akan BBM sangat besar untuk menopang kebutuhan perindustrian dan upaya perang Jepang.

“Pasukan Belanda yang berpangkalan di Tarakan, khususnya KNIL dan angkatan laut sebenarnya sudah tahu akan datangnya serangan Jepang itu. Kehadiran pasukan Jepang dengan kapal perang terlihat pertama kali oleh pesawat patroli Belanda. Menyadari bahwa pasukannya tidak akan mampu bertahan jika pasukan Jepang tiba, komandan pasukan Belanda di Tarakan Letkol S De Wall memerintahkan untuk membakar semua sumur minyak yang ada. (Poerwoko cs, 2008:81)

Ketika pasukan Jepang yang dikomandani Mayjen Shizuo Sakaguchi melancarkan pendaratan, perlawanan yang dilakukan militer Belanda benar-benar tak berarti. Dalam waktu sehari hampir semua pertahanan Belanda dihancurkan. Tentara yang menyerah dianggap bersalah karena membakar sumur minyak, dan

langsung dieksekusi. Setelah berhasil menaklukkan Tarakan, Mayjen Shizuo Sakaguchi kembali meneruskan penyerangannya ke Balikpapan dan diteruskan ke Banjarmasin. Setelah Mayjen Shizuo Sakaguchi berhasil menguasai sebagian wilayah di pulau Borneo, Letjen Hitoshi Imamura pun tidak mau kalah. Imamura memerintahkan pasukan pendarat marinir yang saat itu sudah berpangkalan di Kendari agar secepatnya merebut Makassar. Setelah angkatan laut Jepang berhasil menduduki wilayah Hindia-Belanda (Indonesia) bagian timur ini, tiba giliran pasukan darat Jepang yang mendarat di pulau Sumatera. Invasi Jepang ke pulau Sumatera di Indonesia dimulai pada 14 februari 1942 oleh angkatan darat militer Jepang ke-25. Tidak lama setelah angkatan darat Jepang masuk di pulau Sumatera, mereka dengan cepat memasuki pulau besar lainnya yang dianggap penting yaitu pulau Jawa.

Sasaran Jepang menggempur pulau Jawa adalah melumpuhkan komando pusat pasukan sekutu (Belanda) di Jakarta. Ada tiga kawasan strategis target serbuan Jepang, Pertama basis operasi laut dan darat. Basis operasi laut dan darat itu berpangkalan di Surabaya (laut) dan Bandung (darat). Kedua, Jakarta (Tanjung Priuk) yang merupakan pelabuhan dan pertahanan terbaik Belanda serta menjadi sarana komunikasi sekaligus mobilitas dengan sekutunya. Yang terakhir adalah Cilacap, pelabuhan yang terletak disebelah pantai selatan Jawa merupakan pintu gerbang Jawa dari arah selatan sekaligus jalur potensi armada laut dari Australia.

Pada tanggal 27 februari 1942, pasukan angkatan laut Jepang mulai bergerak cepat untuk menguasai target tiga wilayah yang dianggap penting

tersebut. Mereka bergerak melalui selat Makassar dan memusatkan kekuatannya untuk menyerang Jawa.

“Kekuatan pasukan Jepang yang ditugaskan untuk menyerbu Jawa merupakan pasukan Eastern Force yang berpangkalan di Filipina, 48th division dan 56th regimental group serta pasukan Jepang yang berpangkalan di Vietnam, 2nd division dan 230th regiment jumlah total dari semua pasukan Jepang yang dikerahkan menyerbu Jawa sekitar 35.000 orang yang dikomandani oleh Letjen Hitoshi Imamura. Sedangkan pasukan sekutu yang berpangkalan di Jawa terdiri dari pasukan Belanda (25.000), Australia (2,500), Inggris (3,500), dan AS (1.000). Pasukan Belanda dipimpin oleh Jendral Hein TerPoorten. Sedangkan pasukan gabungan AS, Inggris, dan Australia, dipimpin oleh HDW Sitwell. (Poerwoko,cs, 2008:87)

Untuk mengalahkan pasukan-pasukan Belanda dan sekutu serta mengambil alih pemerintahan di pulau Jawa, diperlukan waktu kurang dari satu bulan. Kekuatan militer Belanda tumbang; hanya ada segelintir gerombolan tentara yang masih tetap bertahan di beberapa daerah terpencil. Kebanyakan rakyat Indonesia tidak memberi bantuan kepada mereka. Di beberapa daerah rakyat Indonesia malah menyerang serdadu-serdadu dan warga sipil Belanda, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri ialah menyerah kepada pihak Jepang.

“Setelah kurang lebih setahun Jepang menduduki Indonesia, perkiraan-perkiraan tentang jumlah terakhir seluruh tawanan adalah sekitar 170.000 orang, 65.000 orang diantaranya tentara Belanda, 25.000 orang serdadu-serdadu sekutu lainnya, 80.000 orang warga sipil (termasuk 60.000 wanita dan anak-anak)”. (M. C. Ricklefs 2008:422).

Tujuan utama Jepang dalam pendudukannya di Indonesia adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi

jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Untuk mengambil alih pemerintahan Belanda di Indonesia, Jepang melakukan gerakan mobilisasi, dengan mengadakan berbagai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menguasai Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka banyak mengalami masalah seperti yang dialami Belanda. Oleh karena itu pemerintah Jepang tetap menggunakan hukum kolonial Belanda kecuali yang bertentangan dengan hukum militer Jepang. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa kebijakan Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

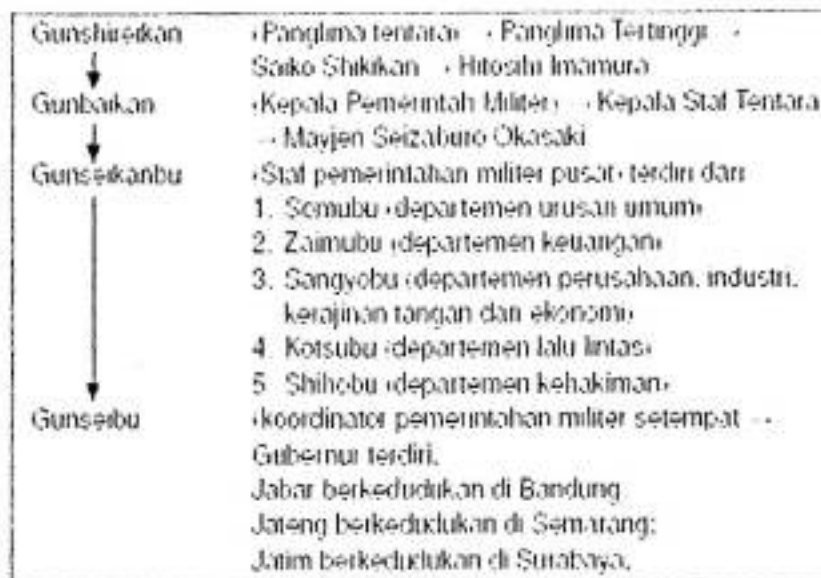
Menurut M. C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200-2008(2008:422).

“kebijakan-kebijakan di antara wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang sangat berbeda. Pada umumnya, Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting; sumber dayanya yang paling utama adalah manusia”.

4.1 Struktur Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia

Agar bisa lebih mudah mengatur dan mengkoordinir masyarakat di daerah pendudukan, panglima tertinggi militer Jepang (*Gunshireikan*) membentuk suatu pemerintahan militer pusat (*Gunseikanbu*) yang dikepalai oleh seorang gubernur

militer (*Gunbaikan*) di Jakarta. Berikut adalah gambaran mengenai struktur pemerintahan militer Jepang di Indonesia:



Sumber: carnews-online.blogspot.com/2009...eri.html

Gbr.1 truktur pemerintahan militer Jepang

Pemerintah militer pusat Jepang di Indonesia mempunyai departemen-departemen di bawahnya yang membantu untuk mengurus peningkatan SDM dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah pada bidang tersebut. Departemen-departemen tersebut adalah:

1. Departemen urusan umum
2. Departemen keuangan
3. Departemen perusahaan, industri, kerajinan tangan, dan ekonomi,
4. Departemen lalulintas
5. Departemen kehakiman

Kelima departemen tersebut berada dibawah kekuasaan pemerintah militer (gunseikan), dan banyak orang terpelajar Indonesia diangkat menjadi pejabat dalam departemen-departemen tersebut. (Sarah Lie. China, 25 Mei 2007.)

4.2 Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa (1942-1945)

Untuk bisa secepatnya menguasai negara Indonesia yang dulunya dinamakan Hindia-Belanda, Jepang langsung mengambil langkah cepat, seperti menghentikan revolusi-revolusi yang mengancam penaklukan mereka dengan melakukan



Sumber: carnews-online.blogspot.com/2009...eri.html
Gbr. 2 Propaganda Jepang

serangan-serangan terhadap orang-orang Eropa dan perampokan terhadap rumah-rumah mereka di Banten, Cirebon, Surakarta dan banyak kota-kota kecil lainnya. Ini tampak akan menjurus ke suatu gelombang revolusi.

Orang-orang belanda dan orang Eropa lainnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan yang terbagi atas kamp laki-laki, wanita, dan anak-anak. Bagi tawanan laki-laki orang Belanda dipekerjakan (sama seperti orang Indonesia) dijadikan kuli untuk membuat jalur-jalur transportasi dan sistem pertahanan.

4.2.1 Bidang Politik

Sampai bulan Agustus 1942 pendudukan Jepang di Indonesia, Jawa tetap berada di bawah sistem pemerintahan sementara tetapi kemudian dilantik suatu

pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur militer atau yang dikenal dengan nama *Gunseikan*. Banyak orang-orang Indonesia yang diangkat untuk mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang, di bawah pejabat-pejabat yang berkebangsaan Jepang yang ditunjuk.

“Kebanyakan pejabat baru yang berkebangsaan Indonesia itu merupakan orang-orang yang berpendidikan atau berprofesi sebagai guru. Dengan pergantian profesi mereka, dari guru menjadi pejabat-pejabat pemerintahan Jepang, mengakibatkan merosotnya standar pendidikan secara tajam”. (M. C. Ricklefs, 2008:427).

Untuk membantu mengatur negeri ini, pihak Jepang di Jawa juga mencari pemimpin-pemimpin politik untuk membantu memobilisasi rakyat. Pertama-tama mereka menghapuskan semua organisasi politik. Setelah pembubaran organisasi-organisasi tersebut, pihak Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru yang akan dibahas pada bidang militer Jepang. Pada bulan april 1942, usaha pertama dalam bentuk gerakan rakyat, “Gerakan Tiga A”, dimulai di Jawa. Nama ini diambil dari slogan bahwa Jepang “Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia”. Secara umum, gerakan tiga A ini tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Para pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan, selain itu tidak ada juga seorang nasionalis Indonesia terkemuka yang terlibat di dalamnya. Selain itu, propagandanya dilancarkan begitu keras, bahkan pada awal masa pendudukanpun hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapi secara serius.

Pihak Jepang mulai menyadari bahwa jika ingin memobilisasi rakyat Jawa, mereka harus memanfaatkan tokoh-tokoh terkemuka.

“Pada bulan oktober 1942, suatu pertemuan para pemimpin daerah-daerah pendudukan di Tokyo diberi tahu bahwa, dengan terhentinya kemajuan militer, mobilisasi rakyat di wilayah-wilayah pendudukan harus diberi prioritas. Pada saat itu Kolonel Horie Choso, yang menjabat sebagai kepala kantor urusan agama di

Jakarta melakukan perjalanan keliling Jawa pada akhir tahun itu, mengadakan pertemuan dengan para kyai yang pesantren-pesantrennya tampaknya menjadi alat yang ideal untuk memobilisasi dan mendoktrinasi para pemuda". (M. C. Ricklefs, 2008:431).

Para kyai menjadi prioritas utama yang dijadikan alat untuk memobilisasi rakyat, karena pada saat itu Jepang sadar bahwa untuk bisa memobilisasi rakyat, harus memobilisasi tokoh masyarakatnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, para kyai yang juga merupakan tokoh masyarakat yang mendapat prioritas utama mobilisasi.

4.2.2 Bidang Ekonomi

Pendudukan Jepang di Indonesia mengakibatkan perubahan besar-besaran di pedesaan Jawa. Tujuan pokok penyerbuan Jepang ke Indonesia ialah mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia. Pedesaan Jawa, dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa dan Jepang berusaha mengeksploitasinya dengan seefisien mungkin melalui kontrol secara intensif di pulau ini. Kegiatan-kegiatan ekonomi diarahkan sedemikian rupa untuk bisa menopang upaya perang Jepang. Produksi bahan makanan sangat diperhatikan dan mendapat prioritas tertinggi untuk konsumsi pasukan militer Jepang.

Melihat produktivitas beras yang sangat rendah, Peningkatan produksi makanan menjadi salah satu persoalan paling serius bagi pemerintah militer sejak awal pendudukan. Mereka menganggap bahwa produktivitas bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berbagai tindakan telah diambil oleh pemerintah pendudukan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi seperti memilih jenis-jenis bibit padi yang lebih cocok bagi kondisi alam dan

iklim di pedesaan. Untuk mendukung usaha peningkatan produksi beras selain memilih jenis-jenis padi yang cocok untuk ekologi pedesaan. Pemerintah Jepang juga mengajarkan teknik penanaman padi kepada petani-petani di pedesaan.

Salah satu teknik penanaman yang diperkenalkan Jepang ialah memindahkan bibit tanaman padi pada garis-garis lurus dengan jarak tanam tertentu diantara bibit tersebut. Sebelum pecahnya perang, petani di pedesaan Jawa menanam padi secara acak atau tidak sesuai dengan garis lurus, dan Jepang berpendapat bahwa hal itu merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas padi.

“berbagai percobaan telah dilakukan oleh para insinyur pertanian Jepang, dan akhirnya ditemukan bahwa jarak tanam yang ideal di antara bibit bagi kebanyakan daerah Jawa, dengan tatanan lingkungan serta berbagai jenis padi yang ada ialah 20cm. keseriusan Jepang untuk meningkatkan produksi beras terlihat dengan mengirim spesialis pertanian baik Jepang maupun Indonesia untuk melakukan pengawasan di desa-desa, serta mendemonstrasikannya di atas sepetak tanah yang ditunjuk sebagai tanah percobaan”. (Aiko Kurasawa, 1993:9).

Selain dorongan nasional untuk meningkatkan produksi beras, petani juga benar-benar menderita akibat kebijakan-kebijakan pemasaran Jepang yang dikenakan secara semena-mena atas produk mereka. Kebijakan-kebijakan ini yang ditujukan untuk kontrol sepenuhnya atas pengumpulan dan distribusi barang, terlihat jelas dari system “wajib serah” yang mengharuskan petani harus menyerahkan sebagian produksi mereka kepada pemerintah dengan harga resmi yang sangat rendah.

Dibawah pemerintahan Jepang, Jawa ditetapkan sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau di luar Jawa, Malaya-Inggris, Singapura serta untuk medan pertempuran di daerah Pasifik Selatan. Ketika tentara Jepang menyerbu Jawa

pada bulan maret 1942, panen di musim penghujan baru saja akan di mulai. Mula-mula Jepang begitu sibuk memulihkan ketertiban, sehingga mereka tidak dapat membentuk kebijakan apapun dari pihak mereka sendiri. Mereka hanya melanjutkan kebijakan Belanda, yang pada dasarnya bersifat pasar bebas kecuali untuk kontrol harga.

“Pada waktu itu, petani masih memiliki kebebasan untuk menyisihkan produksi mereka, dan setiap pasukan Jepang membeli beras yang dibutuhkan bagi jatah mereka sendiri melalui *rijst verkoop central* yang ada, yang sekarang berubah nama menjadi *beikoku tôsei kai* (B.T.K., persatuan control beras). Baru pada bulan Agustus 1942, lima bulan setelah penyerbuan, pemerintah militer Jepang (*Gunseikanbu*) mengambil langkah-langkah pertama ke arah perolehan bahan pangan secara lebih sistematis”. Aiko Kurasawa(1993:67)

Sebuah organisasi untuk pengelolaan bahan yang disebut *shokuryô kanri zimusho* (S.K.Z., kantor pengelolaan makanan), dibentuk di bawah departemen perindustrian *gunseikanbu*. S.K.Z., dengan cabang-cabang di Semarang dan Surabaya, bertanggung jawab atas pengenalan seluruh proses pembelian dan distribusi beras di bawah monopoli negara. S.K.Z. juga menetapkan jumlah padi yang harus serahkan kepada pemerintah dan menetapkan harga beras resmi, juga merancang program terperinci untuk distribusi beras bagi penduduk perkotaan. Sejak awal tahun beras yang baru, yaitu April 1943, pasar beras bebas sama sekali dilarang. Petani diharuskan untuk menyerahkan sejumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah dari hasil panen mereka. Padi yang diserahkan akan digiling dan didistribusikan melalui tangan pemerintah. Penggiling dan pedagang beras yang ada tidak lagi diizinkan untuk beroperasi atas kehendak mereka sendiri, tetapi hanya diperbolehkan beroperasi sebagai agen-agen teknis S.K.Z., yang diizinkan mengolah atau menangani beras dengan imbalan tertentu.

Wajib serah padi secara resmi diawali dengan dikeluarkannya dekrit di setiap daerah, dan masing-masing daerah diizinkan untuk menerapkan dekrit tersebut sesuai kehendak mereka. Ada petunjuk dasar mengenai penyerahan padi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Petani diharuskan menjual 70 persen dari produksi mereka kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
2. Padi harus diserahkan ke penggilingan beras yang ditunjuk melalui pemerintah desa.
3. Jika petani masih memiliki surplus untuk dijual setelah menyerahkan kuota yang ditetapkan, mereka hanya diperbolehkan menjualnya ke penggilingan yang terdaftar dan tidak diizinkan untuk menjual kepada tengkulak atau pasar setempat, dan dilarang menumbuk gabah untuk kepentingan komersial tanpa izin pemerintah. (Aiko Kurasawa, 1993:73).

Pada dasarnya masih banyak petani yang tidak setuju dengan penyerahan wajib beras kepada pemerintah. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang membuat propoganda di berbagai media cetak mengenai semangat kerja dan berusaha menyadarkan petani bahwa pentingnya penyerahan beras kepada yang berwajib.



Sumber: carnews-online.blogspot.com/2009...eri.html
Gbr. 3 Propaganda jepang untuk petani

Meskipun telah membentuk kebijakan yang cukup menguntungkan pemerintah militer, tetapi pemerintah militer masih belum puas dengan kebijakan tersebut, maka Untuk mengambil lebih banyak lagi keuntungan dari daerah pendudukan di Indonesia,

“Jepang mengatur perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah militer daerah pendudukan membanjiri Indonesia dengan mata uang pendudukan yang mendorong peningkatan inflasi untuk mendapatkan keuntungan bagi keperluan perang Jepang, terutama mulai tahun 1943 dan seterusnya”. (M.C. Ricklefs , 2008:425)

“Sebuah lembaga yang sangat penting untuk menendalikan perekonomian di Indonesia juga dibentuk yang dikenal dengan nama Jepang *kumiai* (koperasi gaya jepang). *Kumiai* bertugas sebagai unit dasar untuk menangani seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Kebijakan Jepang menyangkut koperasi yang paling jelas dan sistematis terlihat dari program yang diumumkan pada hari ulang tahun kaisar pada tanggal 29 april 1944. Sebenarnya, koperasi bukan hal baru bagi orang Jawa. Pada zaman Belanda pun sudah ada beberapa koperasi yang didirikan”. (Aiko Kurasawa, 2003:209)

Di bawah pemerintahan Jepang, pemerintah memulai usaha aktif melakukan reorganisasi koperasi yang ada, serta segera membentuk yang baru setelah mereka berhasil menduduki Jawa. Upaya-upaya diperkuat dengan mengadakan program baru yang disebut “susunan perekonomian baru untuk rakyat di Jawa” (*Jawa fuumin keizai shintaisei*). tujuan resmi pembentukan koperasi ialah demi melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia, yang terancam oleh China, serta membantu perkembangan industri nasional. Namun, keinginan sesungguhnya dari pihak Jepang adalah untuk mengambil keuntungan dan memperkuat cengkraman mereka atas kegiatan ekonomi pribumi serta atas orang China.

Jepang memerintahkan bahwa setiap kelompok kejuruan di bidang wiraswasta harus menyelenggarakan satu koperasi, sehingga seluruh wiraswasta

yang ada, besar dan kecil, dapat dikontrol lewat ini. Keikutsertaan mereka dalam koperasi ini jelas karena ada unsur paksaan. Pabrik yang tidak bergabung dalam koperasi yang tepat tidak diberi pemasokan barang atau penyaluran produk mereka, dan pemilik toko juga tidak dikirim barang jika tidak bergabung ke dalam koperasi.

Kumiai sebagai sebuah organisasi yang dibentuk atas peraturan pemerintah dan melibatkan seluruh desa. Dalam buku Mobilisasi dan Kontrol yang ditulis oleh Aiko Kurasawa, "menurut masyarakat pada masa itu, *kumiai* tidak dapat dianggap sebagai koperasi, ia lebih seperti kantor pemerintah di bawah pengawasan pangreh praja. Beberapa penduduk desa baru menyadari bahwa *kumiai* pada zaman itu agak mirip dengan KUD (Koperasi Unit Desa) sekarang ini".

4.2.3 Bidang Sosial-Budaya

Pendudukan awal pendudukan Jepang di Indonesia Jepang dengan cepat menyebarkan pengaruhnya dengan memusnahkan pengaruh barat. Pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan bahasa Jepang. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris, memperkenalkan kalender Jepang, meruntuhkan patung-patung Eropa, jalan-jalan diberi nama baru, dan pada upacara keagamaan Jepang, semua orang harus membungkukkan badan sebagai penghormatan kepada kaisar di Tokyo. (Poerwoko, cs, 2008:23).

Alasan kedatangan Jepang di Indonesia berbeda dengan Belanda yang sekaligus menyebarkan agama yang mereka anut, sedangkan bangsa Jepang

tidak begitu mementingkan agama yang mereka yakini. Kedatangan Jepang juga tentunya bukan hanya bermaksud menghilangkan pengaruh barat, tetapi tujuan utama kedatangan mereka adalah ingin mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia.

Tidak cukup dengan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, Jepang juga mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia. Permintaan tenaga kerja meningkat ketika situasi perang semakin berkobar, terutama setelah perang beralih semakin memburuk bagi Jepang dalam pertengahan tahun 1943.

“Pada bulan September 1943, pemerintah Jepang dan penguasa militer di Jepang mengeluarkan perintah “daerah yang mutlak harus dipertahankan” (*zettai kokubōken*) yang meliputi daerah Asia Tenggara serta Papua Nugini dan memusatkan pertempuran dan pertahanan yang putus asa demi daerah ini. Pada saat itulah dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun pertahanan seperti perlindungan serangan udara yang kemudian di bulan oktober 1943 pihak Jepang memerintahkan penghimpunan serdadu-serdadu ekonomi (*rōmusha*)”. (Aiko kurasawa, 2003:124)

Dikatakan serdadu-serdadu ekonomi, karena dalam kerjanya, *rōmusha* juga berperan penting dalam memperlancar perekonomian di Indonesia yang diatur oleh pemerintah militer. Dalam pengertian bahasa Jepang, secara harafiah *rōmusha* diartikan sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Tetapi jika dilihat dari konteks sejarah Indonesia, istilah *rōmusha* ini mempunyai pengertian khusus dari masyarakat. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern, ada pernyataan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang pernah menjadi bagian dari *rōmusha*, *rōmusha* diartikan sebagai buruh kuli yang di mobilisasikan bagi pekerjaan kasar di bawah kekuasaan pemerintah militer Jepang, tetapi Bagi orang awam yang tidak mengetahui mengenai perekrutan *rōmusha*, mereka mungkin saja berpendapat bahwa *rōmusha* merupakan tenaga

kerja yang direkrut secara paksa oleh pemerintah militer untuk dipekerjakan secara kasar tanpa upah.

Untuk membuat pertahanan yang kuat, diperlukan banyak tenaga pekerja yang bisa membangun pertahanan tersebut. Maka pada bulan oktober 1943 pihak Jepang membentuk penghimpunan serikat pekerja (*rómusha*). Jepang membuat prinsip resmi bahwa *rómusha* terdiri dari pria dan wanita yang sehat rohani dan jasmani dan harus mendaftar semata-mata atas keinginannya sendiri. Adapun perkecualian untuk *rómusha* adalah:

- a. *Gunjin* atau *gunzo* (orang-orang Jepang dari *gunseireibu* atau *gunseikanbu*);
- b. Tentara sukarela pembela tanah air (PETA) dan *heiho*;
- c. Mereka yang dianggap badannya lemah dan tidak tahan bekerja;
- d. Mereka yang sedang merawat anak atau orang tua yang sedang sakit yang dianggap berbahaya bila ditinggalkan dan orang-orang cacat;
- e. Jika dianggap berhalangan untuk kehidupan keluarga mereka;
- f. Mereka yang dipenjara.

Sumber:(Aiko Kurasawa, 2003:162)

Hal ini terjadi pada awal di buatnya kebijakan *rómusha*, ketika rakyat belum memperoleh gambaran yang pasti mengenai *rómusha* itu dan dan masih ada janji upah tetap serta makanan yang dapat menarik sebagian penganggur yang menderita kelaparan. Tetapi lama kelamaan, ketika nasib *rómusha* sudah diketahui oleh masyarakat, sangat mustahil mendapatkan pendaftar sukarela.

★ *Soekakab anak pembatja meudjadi begini?* ★

Tiga bulan sesudahnja di Djepang membawa 1600 "haj bo" dan "romusha" kepoelan Noemfoer (Papea) hanya tinggal hidoep 251.

Jeng karepe wat karepe KE LAPAAN atau DIPOTONG KEPALANA, atau wat karepe DIPOLKOL atau DEKOROL, MASIH HIDOEP atau DIPAROC KETANAH DAN DITINGGALKAN SAMPAI MATI.

■ Djepang sandi datoe genak dan sepat!

BERINGGIR SOEKARNO? SA
GAIMANA RASA DIHATI
TOLAH MELIHAT TOLAH
PEKERDIAAN TOLAH IN??



sumber:rosodaras.wordpress.com/2009/06/...romusha
Gbr. 4 Nasib romusha yang di publikasikan

Melihat situasi seperti ini penguasa militer mulai melakukan berbagai tekanan seperti bujukan dan ancaman. Untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, pemerintah menggunakan orang-orang nasionalis Indonesia untuk ikut menggerakkan atau member semangat kepada romusha, selain itu pemerintah juga membentuk organisasi perekrutan romusha yang disebut Perhimpunan Urusan Buruh (*rōmu kyōkai*).



sumber:rosodaras.wordpress.com/2009/06/03/bung-karno-dan-lambar-hitam-romusha
Gbr. 5 Sukarno yang terlibat aktivitas *rōmusha*

Pemerintah juga mengumumkan cabang organisasi ini harus dibentuk di setiap daerah yang dianggap berpotensi dalam perekrutan *rómusha* di bawah pengawasan pemerintah.

Adapun fungsi dari organisasi ini adalah:

1. Untuk meningkatkan semangat kerja.
2. Penelitian atas pemasokan tenaga kerja dan pendaftaran calon tenaga kerja.
3. Perekrutan *rómusha*.
4. Pengangkutan *rómusha*.
5. Member bantuan kepada keluarga *rómusha* yang ditinggalkan.
6. Mengatur pengiriman uang dan surat dari *rómusha* ke keluarga mereka.
7. Meninjau tempat kerja *romusha* dan menghibur mereka.
8. Mengatur tempat tinggal *rómusha*.
9. Dan lain-lain yang diperintahkan *shuuchókan* (kepala desa).

Di samping mendorong tenaga kerja *rómusha* dan meningkatkan semangat kerja, Jepang juga memberi perhatian pada tenaga kerja terdaftar, dan disini juga Jepang menerapkan system "latihan". Sejak sebelumnya, telah dilakukan usaha-usaha oleh *rómu kyókaí* daerah dan pemerintah daerah untuk menjaring para gelandangan dan pengangguran serta memberikan latihan teknis bagi mereka di pabrik dan tempat-tempat kerja lainnya. Adapun tujuan diadakannya latihan bagi para *rómusha* tersebut adalah untuk meningkatkan dan memperkuat tenaga kerja serta untuk mempertahankan kesehatan spiritual dan fisik. (Aiko Kurasawa, 1993:163)

Di bawah kebijakan *rómusha* seperti itu, pada bulan juli 1943 dibuat sebuah perjanjian antara penguasa angkatan darat Jepang di Jawa (A.D. ke-16) dan penguasa angkatan laut di Makassar. Dalam perjanjian menyangkut pemasokan tenaga kerja dari Jawa ke wilayah yang diduduki angkatan laut dirumuskan sebagai berikut:

1. Rencana pemasokan tenaga kerja harus diperbaharui setiap setengah tahun.
2. Angkatan laut harus membayar angkatan darat sebesar F.5 per *rómusha* untuk menutup seluruh biaya yang diperlukan bagi perekrutan dan transportasi.
3. Upah mula-mula dari seorang *rómusha* harus sebesar F.0,05 per hari, dan kontrak kerja harus berlaku selama satu tahun.
4. Angkatan laut harus memberikan sarana perumahan bagi *rómusha*.
5. F.3,00 harus diambil setiap bulan dari upah seorang *rómusha* untuk dikirim kepada keluarganya.

4.2.4 Bidang Militer

Pada awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengerahkan usaha-usahanya pada mobilisasi. Gerakan-gerakan pemuda yang baru diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Pada tanggal 1 maret 1943 organisasi politik yang dijanjikan juga dibentuk di Jawa, dan gerakan Tiga A dihapuskan. Organisasi baru itu dinamakan pusat tenaga rakyat yang disingkat atau lebih dikenal dengan "Putera". Organisasi ini dibawah pengawasan ketat pihak Jepang, dan empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya yakni Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansyur.

“Suatu korps pemuda (*seinendan*) yang bersifat semi militer dibentuk pada tanggal 29 april 1943 untuk para pemuda yang berusia antara 14-25 tahun. Gagasan tentang latihan dan pengendalian pemuda telah lama dipikirkan oleh penguasa militer, yang sungguh-sungguh menyadari kekuatan potensial dari pemuda. Sejak awal *seinendan* telah ditempatkan di bawah control ketat pemerintah. Organisasi ini secara langsung diawasi oleh kantor pengajaran (*bunkyo-kyoku*), departemen urusan dalam negeri (*naimubu*), *gunseikanbu*”. (M.C.Riclefs, 2008:431).

Melihat struktur seperti ini, terlihat betapa pemerintah pendudukan sungguh-sungguh menjaga agar *seinendan* berada di bawah control ketat pangreh praja serta menghindari kaum nasionalis. Ada bermacam-macam latihan, kegiatan dan fungsi *seinendan* pada waktu itu, seperti latihan bahasa jepang, kegiatan-kegiatan sukarela dan kepentingan umum seperti kebersihan jalan, pembangunan irigasi, dan infrastruktur lainnya, peningkatan semangat kerja, latihan dalam berbagai kejuruan, pencegahan serangan udara dan kebakaran, dan latihan memobilisasikan tenaga manusia dalam keadaan darurat”.

Meskipun dikatakan keikutsertaan masyarakat dalam *seinendan* bersifat sukarela, sesungguhnya anggota ditunjuk oleh kepala desa dari kalangan muda terdidik. Dalam keanggotaan *seinendan* juga dituntut untuk menyisihkan waktu, tenaga, dan uang bagi kegiatan-kegiatan *seinendan*. Mereka harus menghadiri latihan mingguan di kota kecamatan. Keikutsertaan mereka dalam latihan dan kegiatan biasanya tidak diberi imbalan materi, kecuali semacam sumbangan dari masyarakat dalam bentuk makanan kecil dan minuman. *seinendan* mempunyai cabang-cabangnya sampai ke desa-desa yang besar, tetapi terutama aktif di daerah perkotaan.



Sumber : CV. baru, 1985, hal. 180
 + 6 Gbr. Latihan Seinendan Kebangkitan semangat
 keprajuritan rakyat Indonesia

Untuk pemuda yang berusia 25-35 tahun, pada tanggal yang sama 29 april 1943 dibentuklah suatu korps kewaspadaan (*keibódan*) sebagai organisasi keamanan. Karena pembentukannya pada satu waktu, kedua organisasi tersebut sering disebut bersama-sama dan diperlakukan sebagai organisasi kembar yang sifatnya kurang lebih sama. Namun sebenarnya kegiatan dan fungsi *keibódan* banyak berbeda dengan *seinendan*.

Keibódan pada dasarnya adalah sebuah organisasi keamanan di bawah kontrol kepolisian, sementara *seinendan* organisasi semacam kepanduan di bawah kantor pengajaran departemen dalam negeri. *Keibódan* mempunyai peran sebagai tenaga bantu kepolisian yang bekerja untuk menjaga keamanan, sementara *seinendan* lebih mengarah kearah pemanfaatan bagi pekerjaan produktif.

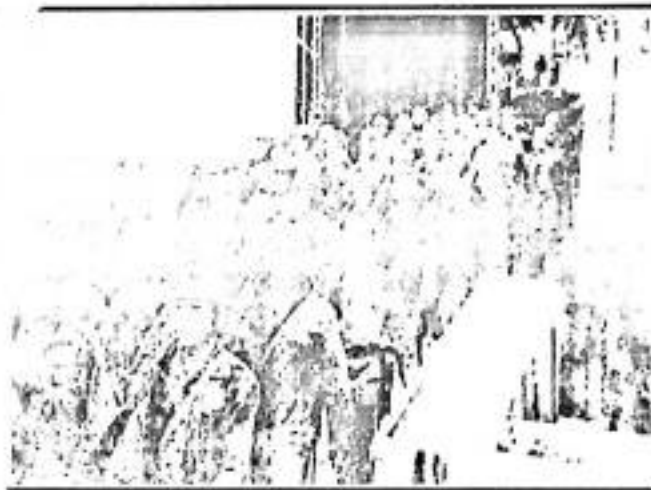
“Anggota *keibódan* biasanya dilatih secara teratur sekitar dua kali seminggu. Latihan secara teratur terdiri dari latihan semi kemiliteran dengan menggunakan pentungan dan bambu runcing, baris-berbaris, dan *taisó* (gerak badan). kegiatan-kegiatan *keibódan* menyita waktu. Kadang-kadang latihan berlangsung selama beberapa hari dan selama itu pun para anggota terpaksa tidak bekerja. Di samping latihan, mereka juga harus memikul berbagai tanggung jawab, di beberapa daerah mereka diberi upah sedikit untuk tugas-tugas mereka”. (M.C. Ricklefs, 2008:431).

Meskipun latihan-latihan *keibódan* banyak menyita waktu, dan tugas-tugasnya berat, ada juga manfaat menjadi anggota dari *keibódan* tersebut. Dengan bertindak atas nama kekuasaan polisi, mereka menyandang tanggung jawab dan kewenangan yang tidak biasa bagi usia dan status mereka. Walaupun masih berusia sekitar dua puluh dan tiga puluhan, mereka dapat menggunakan kekuasaan yang luar biasa. Misalnya dengan menjaga tempat-tempat seperti perbatasan desa, stasiun kereta api, dan persimpangan jalan penting, mereka mengawasi barang bawaan orang yang lewat. Apabila seorang anggota *keibódan* mendapati orang yang membawa sesuatu secara ilegal, mereka menyitanya dan menyerahkannya kepada polisi. Secara umum kebanyakan penduduk desa tidak menyukai kehadiran *keibódan*, dan anggotanya sering ditakuti dan tidak disukai. Dengan cara demikian, pembentukan *keibódan* sering menciptakan pemilahan secara tajam di dalam masyarakat di desa-desa.

Kemudian Pada pertengahan tahun 1943, dibentuk pasukan pembantu (*Heiho*) sebagai bagian dari angkatan darat dan angkatan laut Jepang. Pada akhir perang, sekitar 25.000 pemuda Indonesia berada ada dalam anggota *Heiho*, dimana mereka mendapat latihan dasar yang sama dengan para serdadu Jepang. Beberapa organisasi lainnya juga dibentuk dan beberapa diantaranya akan saya bahas di bawah paragraf ini. Menurut beberapa sumber pustaka, pada akhir perang lebih dari 2 juta orang pemuda Indonesia berada dalam organisasi-organisasi semacam itu, kira-kira 60% diantaranya dalam *ketbódan*. (M.C.Ricklefs, 2008:432).

Pada tanggal 3 oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu peta (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia, dan pada akhir perang jumlah anggota peta di Jawa sekitar 37.000 orang. Organisasi ini juga dikenal dengan nama Jepangnya *giyugun*, (tentara-tentara sukarela).

Tidak seperti *heicho*, peta tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang, tetapi dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu untuk melawan serbuan pihak sekutu.



Gbr. 7 Tentara Pembela Tanah Air (1947)

Disiplin peta sangat ketat dan

Sumber: catatan-chiva.blogspot.com/2009/05/tentara-pembela-tanah-air-

ide-ide nasionalis dimanfaatkan dalam indoktrinasi masyarakat Indonesia.

Pada bulan Januari 1944, Putera diganti oleh suatu gerakan rakyat yang baru dalam rangka mencari organisasi yang lebih memuaskan guna memobilisasi penduduk Jawa.

“Jawa *Hokókai*, ‘persatuan kebaktian Jawa’, didirikan bagi setiap orang yang berusia lebih dari empat belas tahun. *Gunseikan* menjadi ketua persatuan tersebut, sedangkan Sukarno dan Hasjim Asjari dijadikan penasehat utamanya, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada Hatta dan Mansyur. *Hokókai* mempunyai cabang-cabang pada setiap tingkat pemerintahan daerah, dengan kepala pemerintahan daerah sekaligus menjabat sebagai pimpinan hokokai. Pada tingkat desa terdapat cabang *hokókai* paling rendah, yang dikepalai oleh kepala desa. Untuk menjalankan operasi sehari-hari, diangkat seorang pegawai paruhwaktu yang disebut *hokókai shóki* (sekretaris hokokai). (Aiko Kurasawa, 2003:354).

hokókai shóki biasanya dipilih dari kalangan penduduk oleh kepala desa melalui tes tertulis, dan biasanya yang terpilih adalah orang muda dan kuat yang juga merangkap sebagai *seinendan* atau *keibódan*. Tidak ditahu pasti apa fungsi utama hokokai, tetapi secara umum fungsi *hokókai* adalah melakukan pekerjaan untuk menguntungkan pemerintah Jepang seperti memperkuat pertahanan militer, mendukung penyesuaian terhadap kondisi peperangan, dan menyediakan bantuan

perlindungan, dan bimbingan kepada seluruh penduduk. Adapun kegiatan *hokókai* yang menyangkut fungsinya secara umum seperti mensponsori kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberantasan buta huruf, kursus menenun, kampanye kebersihan, dan memobilisasikan penduduk desa untuk kerja bakti. Organisasi ini aktif dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada penduduk desa, dan pada banyak kesempatan *hokókai shóki* menyampaikan pidato atas nama pemerintah. Keterlibatan Pihak Jepang tentu saja bermaksud memanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, tetapi pemimpin Indonesia juga mengambil keuntungan dari orang-orang Jepang tersebut. Sukarno sangat berhasil memanfaatkan tamasya propaganda bagi Jawa *hokókai* untuk memperkokoh posisinya sendiri sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat.

“Jawa *hokókai* juga mempunyai suatu alat organisasi untuk menembus desa-desa. Rukun Tetangga (*tonari gumi*) dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh sampai dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan. Untuk pertama kalinya, Jawa *hokókai* diberikan organisasi pemuda sendiri yang bernama Barisan Pelopor yang pada akhir perang kira-kira beranggotakan 80.000 orang. (M.C.Ricklefs, 2008:439).

Pada mulanya Barisan Pelopor akan digunakan untuk menyebarkan propaganda, namun kenyataannya pada bulan Mei 1945 organisasi ini mulai mengadakan latihan gerilya. Banyak anggota barisan pelopor daerah yang kemudian memiliki kesempatan untuk terlibat di dalam perjuangan politik pada tingkat nasional, karena segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Barisan Pelopor ini diubah menjadi organ tempur pro-TNI dengan nama Barisan Banteng.

Pada bulan desember 1944, Masyumi juga diperbolehkan memiliki sayap militer yang bernama barisan Hizbullah, 'Pasukan Tuhan', yang mulai berlatih pada bulan february 1945 dan tersiar kabar bahwa barisan Hizbullah ini mempunyai 50.000 anggota pada akhir perang.

4.3 Dampak Positif-Negatif Pendudukan dan Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1943-1945, tentunya mempunyai dampak positif dan negatif yang menguntungkan atau merugikan daerah pendudukan tersebut. Disini saya akan coba untuk membahas dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa secara berurutan berdasarkan pembahasan kebijakan pemerintah Jepang yang telah saya bahas di atas .

1. Tentunya dampak positif masuknya Jepang di Indonesia adalah terbebasnya Indonesia dari masa penjajahan kolonial Belanda yang telah lama menduduki Indonesia, sedangkan sisi negatifnya adalah, dimulainya zaman pendudukan baru yang bersifat lebih menindas.
2. Menyangkut dampak negatif kebijakan Jepang mengenai peningkatan produksi pertanian dan wajib serah padi di pulau Jawa, adalah pengeksploitasian sumber daya manusia (petani) dan hasil tani. Yang dimaksud pengeksploitasian sumber daya manusia dan hasil tani adalah, petani yang telah bekerja keras dengan mengikuti berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang, hanya mendapatkan beberapa persen dari hasil panen mereka. Ini dikarenakan adanya

kebijakan wajib serah padi kepada pemerintah Jepang. Dampak positif dari kebijakan ini adalah petani Indonesia mendapatkan pengenalan bibit baru yang cocok untuk daerah pertanian di pedesaan Jawa, petani mendapatkan pengajaran mengenai teknik-teknik penanaman padi, petani mendapatkan pengajaran mengenai infrastruktur pertanian, dan yang terakhir petani juga diperbolehkan memperluas area sawah mereka.

3. Diantara semua kebijakan Jepang, mungkin yang paling membuat masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang menderita adalah *romusha*. dampak negatif dari kebijakan *romusha* ini adalah pengeksploitasian tenaga kerja secara besar-besaran. Hal ini bisa dilihat dari apa yang telah saya tulis dalam pembahasan *romusha* di atas. Pada awal perekrutan *romusha*, mereka dijanjikan hal-hal yang sangat menggiurkan, pada kenyataannya mereka hanya dimanfaatkan hanya untuk keperluan perang Jepang. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit dan meninggal pada saat kerja. Sampai sekarang pun pandangan dan ingatan rakyat Indonesia mengenai *romusha* masih tetap buruk. Disamping itu, ada dampak positif yang bisa kita ambil dari kebijakan *romusha* tersebut. Kebanyakan *romusha* dipekerjakan untuk membangun lapangan pesawat terbang, seperti pembangunan pesawat terbang di Banten, dan membuat jalan-jalan baru. Hasil dari kerja keras *romusha* pada saat itu tentunya bermanfaat dan bisa kita gunakan sampai sekarang ini.

4. Selanjutnya, adalah dampak positif dan negatif dari Pembentukan organisasi politik dan semi militer. seperti yang kita ketahui, pada masa pendudukan Belanda, rakyat Indonesia tidak pernah diberi pengenalan organisasi

dan kesempatan untuk duduk dan menjabat sebagai pejabat politik di pemerintahan Belanda. Berbeda pada masa pendudukan Jepang, banyak orang Indonesia yang diangkat mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang di tawan oleh pemerintah Jepang. Selain itu organisasi-organisasi politik yang dibentuk oleh pemerintah Jepang memberi kesempatan rakyat untuk belajar banyak mengenai politik.

Adapun organisasi-organisasi pemuda yang bergerak dibidang semi militer yang dibentuk oleh pemerintah militer adalah korps pemuda (*seinendan*) yang bergerak dibidang semi militer, korps kewaspadaan (*keibodan*) yang berfungsi sebagai pembantu polisi, kebakaran, dan serangan udara, selain itu dibentuk juga pasukan pembantu (*heiho*) yang berperan sebagai bagian dari angkatan darat dan angkatan laut Jepang, dan yang terakhir dan juga paling berarti adalah peta (*pembela tanah air*). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia.

Peta berbeda dengan *heiho*, peta tidak secara resmi menjadi bagian dari bala tentara Jepang. Peta ini juga dikenal dengan nama Jepangnya *giyugun* (tentara suka rela). Konon asal-usul TNI (tentara nasional Indonesia) juga bermula dari *giyugun* tersebut. Berkat semua kebijakan Jepang mengenai pembentukan organisasi ini dan menempatkan orang-orang Indonesia di berbagai organisasi politik dan sebagai pejabat di pemerintahan militer Jepang, bangsa Indonesia benar-benar bisa belajar banyak atau mendapatkan banyak ilmu yang bisa di gunakan pada pembentukan negara setelah Indonesia merdeka.

5. Yang terakhir yang akan saya bahas mengenai dampak positif dan negatif pendudukan dan kebijakan Jepang di Indonesia khususnya di pulau Jawa adalah kebijakan mengenai pengendalian ekonomi yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengambil keuntungan dari daerah yang diduduki tersebut. Dapat kita lihat pada pembahasan mengenai pengendalian ekonomi di atas. Untuk mempermudah pengendalian ekonomi di Indonesia, Jepang membuat suatu lembaga seperti koperasi gaya Jepang yang di kenal dengan nama Jepangnya *kumiai*.

Dampak positif dari pembentukan organisasi ini ialah mudahnya masyarakat menemukan bahan pokok yang mereka butuhkan, karena organisasi ini bertugas mengumpulkan bahan pokok dari pedagang petani dan penghasil bahan pokok lainnya. Sedangkan dampak negatif dari kebijakan pembentukan organisasi ini adalah, sedikitnya keuntungan yang didapatkan oleh penghasil bahan pokok seperti perusahaan-perusahaan, pedagang, petani, nelayan yang di sebabkan oleh rendahnya harga yang diberikan pemerintah pendudukan untuk para penghasil bahan pokok tersebut

Bab V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai latar belakang dan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia, kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaannya di pulau Jawa serta apa saja dampak positif-negatif pendudukan Jepang di Indonesia.

1. Masuknya Jepang dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibentuk di Indonesia khususnya pulau Jawa mempunyai peranan penting dalam perubahan struktur politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya. Jika dilihat dari kebijakan Jepang di Indonesia pada masa itu, semua menyangkut dengan prioritas kebutuhan perang Jepang. Semua perombakan struktur pemerintahan dan gerakan mobilisasi disengaja agar mudah mengatur dan menarik simpati rakyat.

Dimulai dari peningkatan produksi beras dan wajib serah padi. Seperti yang telah dibahas di atas, peningkatan produksi beras dan wajib serah padi sangat menekan petani dan membuat petani menderita. Petani dituntut untuk bekerja keras dan hasil yang mereka dapatkan sangat kecil dari pemerintah pendudukan. Kebanyakan hasil panen mereka di manfaatkan sebagai persediaan makanan tentara militer. banyak petani yang tidak setuju dengan kebijakan ini, begitu juga dengan kebijakan

romusha. meskipun mereka tidak setuju dengan kebijakan romusha tersebut, tidak ada pilihan lain untuk tidak ikut dalam perekrutan romusha. tawaran yang diajukan oleh pemerintah Jepang untuk romusha sangat menggiurkan masyarakat yang kesulitan ekonomi pada saat itu. Selain itu, pengendalian ekonomi yang menggunakan system *kumiai* tersebut, juga sangat menekan rakyat khususnya para pedagang dan penghasil bahan pokok. Meskipun rakyat juga tidak setuju, mereka tetap harus mengikuti kebijakan tersebut. Karena jika mereka tidak bergabung dalam koperasi gaya Jepang tersebut, mereka diancam tidak akan mendapat pasokan barang atau penyaluran produk mereka. berbeda dengan kebijakan mengenai pembentukan organisasi politik dan semi militer yang sangat bermanfaat bagi peningkatan sumberdaya manusia dibidang politik dan militer. kebijakan ini banyak dimanfaatkan oleh rakyat untuk belajar banyak dari bangsa Jepang.

2. Berdasarkan dari realisasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang, kebanyakan tidak sesuai dari apa isi kebijakan tersebut, meskipun tetap dijalankan kebijakan tersebut tidak akan bertahan lama seperti kebijakan-kebijakan Belanda pada masa kolonial.
3. Meskipun semua kebijakan pemerintah militer Jepang bertujuan untuk keperluan industri dan keperluan perangnya, kita juga bisa belajar banyak dari hal-hal positif yang ada dalam kebijakan tersebut seperti, wajib serah padi kita bisa mendapat pengajaran cara menanam padi dan manajemen persawahan, organisasi politik yang member pengajaran di bidang politik

dan pemerintahan. Tidak semua kebijakan Jepang di Indonesia bersifat negatif. Jepang jugalah yang membuka peluang kita bisa terbebas dari masa pendudukan kolonial Belanda yang sangat lama.

5.2 Saran-saran

Dengan selesainya karya tulis ini, maka penulis mengemukakan saran agar kiranya para mahasiswa atau siapa pun yang membaca karya tulis ini, agar dapat mengambil sisi positif dari tulisan ini. Meskipun bangsa Jepang pernah menduduki negara Indonesia dengan cara yang kasar dan kejam, pasti ada sisi positif dan manfaat yang bisa kita ambil pada masa itu, dan berguna pada masa sekarang ini, bahkan sekarang Indonesia dan Jepang telah menjadi dua negara yang bersahabat yang saling membantu saat kesulitan. Jadi penulis sangat mengharapkan bahwa masa pendudukan Jepang di Indonesia jangan dilihat dari sisi negatif saja, tetapi juga harus dilihat dari sisi positifnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, Zainal. Kebijakan Publik, Jakarta, PT Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Baskara, Nando. Kamikaze, Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang, Yogyakarta, Narasi, 2008.
- Beasley, W.G. Pengalaman Jepang, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Burke, Peter. History and Social Theory, New York, Cornell University Press, Ithaca, 1987.
- Jong, De. Pendudukan Jepang di Indonesia, Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Belanda, Belanda 1987.
- Kurasawa, Aiko. Mobilisasi dan Control, Jakarta, PT.Grasindo, 1993.
- Irsan, Abdul. Jepang Polititik, Domestik, Global & Regional, Makassar, Hasanuddin University Press, 2005.
- Poerwoko, Djoko dan Soejatman, Cartono. Perang Asia Timur Raya, Kedigdayaan Dai Nippon, Jakarta, Angkasa, PT Gramedia, 2008.
- Ricklefs, M.C. Sejarah Indoneia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi, November , 2008.
- Widyahartono, Bob. Belajar Dari Jepang, Jakarta, PT.Salemba Emban Patria, 2003.
- B. Artikel dari internet
- A. Rasyid Asba dalam jurnal penelitiannya mengenai aktivitas ekonomi jepang di Sulawesi selatan pada masa perang (1942-1945), 2007

Dwi Martanto, "kebijakan ekonomi pemerintah Jepang di pulau Jawa (1942-1945)", <http://martanto.blogspot.com>

Sarah Lie. China, 25 Mei 2007. Pendudukan Jepang di Indonesia. 17 Mei 2008, [www. Google.com/Alibaba-eurasianga189](http://www.Google.com/Alibaba-eurasianga189)

mangjaya@indobio.com "ilmu dan definisi para ahli mengenai kebijakan"

Shigehito Takahashi. Jepang, 24 Agustus 2001. Luka Kekerasan Sulit Dilupakan. 15 Mei 2008, <http://shigehito.blog.com>.

<http://sejarahindonesiamerdeka.blogspot.com> "pengertian sejarah".

<http://yahookanswer.com> "Pengertian Sejarah Menurut 16 Tokoh".

C. Sumber lain

film *documenter* "Horror in the East" produksi Laurence Rees Historical Consultans : Professor Akira Iriye, Professor Sheldon Hatris, dan Professor Yuki Tanaka, yang di rilis tahun 2006.